

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pengadilan Agama Muara Bulian dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pelaksanaan putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pengadilan Agama Muara Bulian? 2) Bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris yang meliputi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan putusan perceraian pada nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl belum terlaksana dengan baik, dikarenakan Pemohon tidak memberi nafkah sesuai dengan putusan hakim, seharusnya Pemohon tidak semena-mena terhadap tanggungjawab yang sudah disepakati bersama hakim. Pengaduan istri kepada hakim belum ada hingga sampai saat ini dikarenakan istri dan mantan suami sudah tidak berkomunikasi lagi. Menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan berwenang untuk menetapkan kewajiban mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menegaskan kewajiban tertentu kepada mantan istrinya.

Kata Kunci: *Perceraian, Perkawinan, Kewajiban*

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze how the Implementation of Divorce in the Jurisdiction of Muara Bulian Religious Court is carried out when it remains unresolved. The problem formulations in this research are: 1) How is the implementation of Decisions Number 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl and 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl at the Muara Bulian Religious Court? 2) How is it resolved if these decisions are not implemented? The research method in this thesis employs a juridical-empirical legal research type which includes a qualitative approach, utilizing various data collection techniques such as interviews, and document analysis. Based on the research conducted, it is known that the implementation of divorce decisions in numbers 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl and 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl has not been well implemented, because the Applicant did not provide maintenance in accordance with the judge's decision, the Applicant should not arbitrarily neglect the responsibilities that have been agreed upon with the judge. The wife's complaint to the judge has not yet been made because the wife and ex-husband no longer communicate. According to Article 41 (c) of Law Number 1 of 1974, the court has the authority to determine the obligation of the ex-husband to provide living expenses and/or affirm certain obligations to his ex-wife.

Keywords: *Divorce, Marriage, Obligations*